

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) GADINGREJO TIMUR DALAM PENETAPAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPEKON) TAHUN 2014**

**Oleh**

**AGUS PRIYADI**

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon. Sebagai wahana demokrasi pada tingkat pekon, BHP memiliki fungsi legislasi untuk menetapkan peraturan pekon. Peran BHP dalam penetapan peraturan pekon yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon; menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon. Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntut untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Gadingrejo Timur dalam penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori pembuatan kebijakan publik menurut Budi Winarno dan teori interaksi sosial menurut Muhlis Madani. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian dengan mengelola data

*Agus Priyadi*

dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan peran BHP dalam penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BHP Gadingrejo Timur tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Proses penetapan peraturan pekon tersebut ditinjau dari 4 (empat) tahap yaitu identifikasi masalah, agenda *setting*, legitimasi dan penetapan kebijakan. Identifikasi masalah tidak dilakukan oleh BHP, selanjutnya tahap agenda *setting*, legitimasi dan penetapan kebijakan seluruhnya didominasi oleh kepala pekon tanpa melibatkan BHP. Tidak berperannya BHP disebabkan oleh hubungan kontravensi antara BHP atas dominasi yang dilakukan oleh kepala pekon.

Kata kunci: Badan HIPPUN Pemukiman (BHP), peraturan pekon